

**NIKAH SIRRI DAN MOTIVASI DITINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur  
Kotamadya Dumai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**OLEH :**

**J U N A I D I**  
**NIM: 10221019980**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
R I A U  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“NIKAH SIRRI DAN MOTIVASI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai)”**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nikah *sirri* juga disebut nikah yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, bahkan dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan.

Salah satu dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap motivasi menikahi wanita secara *sirri*, terutama pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Latar belakang pemikiran penulis mengangkat judul ini sesuai dengan permasalahan yang penulis perhatikan di lapangan. Bahwasanya nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan merupakan pernikahan / perkawinan yang dilakukan dalam ruangan yang terbatas dan tidak dilakukan pencatatan maupun pengawasan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan ini tidak memperoleh akta nikah.

Berbagai masalah yang muncul dari nikah *sirri* tersebut, diantaranya suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberikan nafkah bulanan kepada istri, laki-laki dapat menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahnya secara *siiri*, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi sulit.

Disamping itu, ada beberapa motivasi seseorang melakukan pernikahan secara *sirri*, diantaranya :

1. Sebagian orang menganggap bahwasanya nikah *sirri* merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Sebagian orang mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara dimana ia bertempat tinggal, dan akhir-akhir ini ada kecenderungan jumlah pasangan yang melakukan nikah *sirri* meningkat, bahkan menjadi suatu *trend*, dengan alasan mencegah perzinahan.

3. Seorang laki-laki yang melakukan nikah *sirri*, bisa berbuat semaunya, dengan alasan bahwa tidak ada bukti hitam di atas putih dari pernikahan tersebut. Sehingga perempuan yang dinikahkan secara *sirri* rawan untuk ditinggalkan begitu saja atau ditelantarkan dan perempuan kesulitan untuk menuntut hak-haknya.

Penelitian penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya metode wawancara dan observasi. Adapun data-data penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Setelah data tersebut diperoleh, penulis menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa.

Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya nikah *sirri* di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai adalah masih banyak masyarakat yang menganggap nikah *sirri* tersebut hanya masalah agama. Penyebab lain adalah kesadaran masyarakat akan keberadaan Undang-undang Perkawinan, sehingga nikah secara sah belum dilaksanakan.

Upaya untuk menanggulangi nikah *sirri* sudah dilaksanakan oleh pihak terkait. Namun, upaya belum berhasil karena upaya yang dilakukan belum terealisasi secara keseluruhan pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografis dan Demografis .....	13
a. Geografis .....	13
b. Demografis .....	14
B. Sosial Budaya .....	16
C. Sosial Ekonomi .....	18
D. Agama .....	21
E. Pendidikan .....	24
F. Adat Istiadat .....	27
 <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI</b>	
A. Pengertian Nikah Sirri ( Bawah Tangan) .....	29
B. Nikah Sirri Menurut Persepsi Fiqh .....	32
C. Bentuk-Bentuk Nikah Sirri .....	34

D. Kemaslahatan Pencatatan Pernikahan .....	37
---	----

#### **BAB IV NIKAH SIRRI DAN MOTIVASI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pelaksanaan Nikah Sirri pada Masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai .....	41
B. Faktor Penyebab Nikah Sirri pada Masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai .....	49
C. Tinjauan Hukum Islam .....	60

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah *Sirri* atau disebut nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah *sirri* cukup memenuhi dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Nikah *sirri* biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga menurut hukum positif, nikah *sirri* tidak legal karena tidak tercatat dalam catatan remi pemerintah dan juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Bagi seseorang yang melakukan pernikahan secara *sirri* sudah merasa cukup dan aman kalau pernikahan/perkawinannya sudah dipandang sah menurut agamanya. Tetapi, sesungguhnya menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus diikuti oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 84

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2, h. 58

Oleh sebab itu, nikah *sirri* adalah pernikahan (perkawinan) yang sah menurut agama, akan tetapi belum memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menuruti perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Sehingga pada pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>4</sup> Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwasanya nikah *sirri* itu merupakan hambatan jalannya ketertiban perkawinan, dan menimbulkan masalah hukum.<sup>5</sup>

Pernikahan (perkawinan) yang dilakukan secara diam-diam, pada umumnya dikarenakan mempelai laki-laki tidak sepadan (*kufu'*), atau ada protes dari pihak keluarga wanita atas pernikahan ini, atau juga mempelai wanita termasuk orang yang

---

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 22

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), Cet. ke-1, h. 20

<sup>5</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Cet. ke-1, h. 11

tidak layak bergabung menjadi bagian anggota keluarga laki-laki, karena kerendahan derajatnya atau karena buruk akhlaknya.<sup>6</sup>

Disamping itu, masih banyak lagi alasan dan motivasi seseorang untuk melakukan nikah *sirri*, diantaranya :

1. Sebagian orang menganggap bahwasanya nikah *sirri* merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Sebagian orang mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara dimana ia bertempat tinggal, dan akhir-akhir ini ada kecenderungan jumlah pasangan yang melakukan nikah *sirri* meningkat, bahkan menjadi suatu *trend*, dengan alasan mencegah perzinahan.
3. Seorang laki-laki yang melakukan nikah *sirri*, bisa berbuat semaunya, dengan alasan bahwa tidak ada bukti hitam di atas putih dari pernikahan tersebut. Sehingga perempuan yang dinikahi secara *sirri* rawan untuk ditinggalkan begitu saja atau ditelantarkan dan perempuan kesulitan untuk menuntut hak-haknya.

Di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai, selain pernikahan yang sah menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, sebagian masyarakatnya melakukan pernikahan secara *sirri* (di bawah tangan) yang lebih cenderung di luar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk lebih jelas, penulis akan kemukakan beberapa peristiwa yang pernah terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Bukit Nenas

---

<sup>6</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alumaka 2 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2008), Cet. ke-4, h. 182-183



Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai yang telah melakukan pernikahan secara *sirri* (di bawah tangan).

“Pada Oktober 2005, yang dikatakan oleh salah seorang warga masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yaitu Pak Adnan. Beliau mengatakan bahwasanya pernah terjadi suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang warga bernama Ari (nama panggilannya). Pernikahan mereka ini tidak mendapat persetujuan orang tua dari pihak perempuan, dikarenakan calon laki-laki yang menjadi pilihannya itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sering main di pasar-pasar, atau lebih dikenal dengan pereman pasar. Kedua pasang remaja ini yang dimabuk asmara tanpa berpikir panjang, mereka melakukan hubungan yang sangat dilarang oleh ajaran agama, demi mendapat persetujuan dari orang tua pihak perempuan, dan akhirnya hubungan mereka diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Mereka mengambil alternatif lain untuk sementara waktu yaitu dengan melakukan pernikahan secara diam-diam kepada Pegawai Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang sudah tidak aktif lagi bertugas di kelurahan tersebut dengan disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Dan setelah beberapa bulan kemudian dari kedua belah pihak merasa mempunyai cukup biaya, maka mereka melangsungkan pernikahan anak-anak mereka secara resmi dan melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pak Adnan, Warga Kelurahan Kecamatan Bukit Kapur, *wawancara*, Oktober 2008

Salah seorang warga masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yang propesinya sebagai pegawai negeri sipil yang ingin menikah lagi, tetapi tidak mendapat persetujuan dan izin dari istri pertamanya. Dan jika ia menikah lagi, maka istri pertamanya akan melaporkan ke kantor tempat ia bekerja. Akhirnya ia membatalkan niatnya untuk melakukan pernikahan, takut kalau ia akan dipecat dari propesinya sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi, berselang beberapa bulan ia tetap dengan niat pertamanya yaitu melakukan nikah lagi, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan pernikahan ini juga dilakukan tanpa melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan kedua ini, yang menikahkannya adalah imam masjid dan juga orang yang terpandang di kelurahan tempat tinggal istri keduanya yang berbeda kelurahan dengan istri pertamanya, dan menjadi wali nikah adalah ayah dari istri keduanya dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.<sup>8</sup>

Ada pula salah seorang warga pendatang berasal dari Kota Medan, bekerja sebagai tenaga buruh di pelabuhan Kota Dumai dan sudah beberapa tahun tinggal di Kelurahan Bukit Nenas. Akhirnya beberapa tahun ini ia menjalin kasih dengan salah seorang perempuan yang ada di Kelurahan Bukit Nenas, beliau juga merubah identitasnya di Kantor Kelurahan dengan berstatus bujang alias belum beristri. Ia pun mengelabui orang tua perempuan tersebut dan meminta izin menikahi anak perempuannya, yang pernikahannya itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan

---

<sup>8</sup> Pak Ibrahim, Warga Kelurahan Kecamatan Bukit Kapur, *wawancara*, Oktober 2008

pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), hanya melalui imam masjid dan beberapa orang jamaah yang ada di kelurahan tersebut sebagai saksi, dengan alasan malu kalau pernikahannya itu belum mempunyai biaya yang cukup. Akan tetapi ia berjanji setelah uangnya sudah terkumpul banyak baru ia akan melakukan pernikahan secara resmi dengan mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, atau istilah sekarang ialah pernikahan di bawah tangan menurut ajaran agama sah, akan tetapi sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku, agar pernikahan kita itu diakui oleh agama dan diakui juga oleh negara, sehingga yang melakukan pernikahan mendapatkan surat nikah secara resmi dan apabila mendapatkan anak, maka anaknya tercatat sebagai warga negara yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dan sebaliknya, apabila mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil setempat, pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan

---

<sup>9</sup> Pak Zamri, Warga Kelurahan Kecamatan Bukit Kapur, *wawancara*, November 2008

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan keluarga, maka tidak bisa dipertanggung jawabkan.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, penulis tergugah untuk meneliti permasalahan tersebut di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai. Karena di Kelurahan Bukit Nenas banyak keluarga yang melakukan nikah *sirri* (di bawah tangan) atau nikah secara diam-diam, kesemuanya itu tanpa mendapat persetujuan atau izin dari orang tua, tanpa mendapat persetujuan dari istri pertama, dan merubah/menipu identitas (mengaku bujang). Dan pernikahan yang mereka lakukan secara diam-diam tersebut demi mewujudkan kesucian dan penjagaan diri dari penyelewengan, serta untuk menghalalkan hubungan mereka sebagai suami istri. Akan tetapi nikah *sirri* dengan itu pula menimbulkan masalah dalam kehidupan baik tentang keabsahannya ataupun perlindungan hukumnya. Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini, dan akan penulis tuangkan ke dalam tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “*Nikah Sirri dan Motivasi Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Drs. Zakaria, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Kapur Kotamadya Dumai, wawancara, November 2008

1. Bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai ?
2. Apa faktor penyebab nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tersebut ?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini difokuskan kepada motivasi nikah *sirri* pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.
- 1.2. Untuk mengetahui faktor penyebab nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.
- 1.3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- 2.1. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang dampak nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

2.2. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khazanah Intelektualitas bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

2.3. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

### **2. Subjek dan Objek**

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan pernikahan secara *sirri*, tokoh masyarakat, tokoh Agama di Kelurahan Bukit Nenas. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah faktor penyebab nikah *sirri* pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah motivasi seseorang yang melakukan nikah *sirri* di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Sedangkan jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 15 pasang yang melakukan nikah *sirri*. Penulis mengambil semua anggota populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sampel dengan menggunakan *Teknik Total Sampling*.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data *Primer* yaitu, data yang penulis peroleh secara langsung dari responden, berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data *Sekunder* yaitu, data yang penulis peroleh dari informasi dan beberapa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta alim ulama dan tokoh masyarakat setempat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Observasi*, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi dilapangan.
- c. *Interview* (wawancara), yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan penulis secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.
- d. *Angket*, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden.

#### 6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisa secara *kualitatif*, yaitu menghubungkan-hubungkan antara satu fakta dengan fakta yang sejenis kemudian dianalisa.

## 7. Metode Penulisan

Setelah semua data-data diperoleh, maka penulis menggunakan metode-metode penulisan sebagai berikut :

- a. Metode *Deduktif*, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.
- b. Metode *Induktif*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian secara khusus kemudian disimpulkan secara umum.
- c. Metode *Deskriptif*, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada kemudian diambil kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ilmiah ini, maka penulis menyusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;** yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian;** yang meliputi Geografi dan Demografi, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kehidupan Beragama, Serta Adat Istiadat.
- BAB III : Tinjauan Umum Tentang Nikah Sirri;** yang terdiri dari Pengertian Nikah Sirri, Nikah Sirri Menurut Persepsi Fiqih, Bentuk-Bentuk Nikah Sirri, Kemaslahatan Pencatatan Pernikahan.



- BAB IV : Nikah Sirri dan Motivasi Ditinjau Menurut Hukum Islam ;** yang meliputi dari pelaksanaan nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai, apa faktor penyebab nikah *sirri* pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran;** terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis dan Demografis**

##### **1. Geografis**

Kelurahan Bukit Nenas adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai. Jarak antara kelurahan dengan kecamatan lebih kurang 2.5 Km dan jarak Kelurahan Bukit Nenas dengan Ibukota (Dumai) lebih kurang 6 Km. Sedangkan jarak Kelurahan Bukit Nenas dengan Ibukota Provinsi adalah lebih kurang 180 Km. Untuk mencapai daerah Kelurahan Bukit Nenas tidaklah sulit, dikarenakan Kelurahan Bukit Nenas memiliki alat transportasi yang memadai seperti oplet dan ojek.

Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mempunyai luas lebih kurang 27.000 Ha. Kelurahan Bukit Nenas mempunyai suhu maksimum dan minimum berkisar antara 26 °C – 32 °C, dengan curah hujan berkisar antara 2.500 mililiter pertahun. Topografis daerah ini bergelombang hingga berbukit dengan produktivitas dataran rendah sampai tinggi.

Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mempunyai daerah tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas (kemarau). Biasanya musim hujan terjadi pada akhir bulan Agustus sampai dengan awal Januari. Sedangkan musim kemarau terjadi pada akhir bulan Januari sampai dengan awal Agustus.

Sementara itu, Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gurun Panjang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kayu Kapur.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Timur.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bagan Besar.<sup>1</sup>

Keadaan tanah di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur pada umumnya terdiri dari tanah gambut dan berawa. Pada bagian daratan tanah tergolong tanah yang bergambut dan oleh masyarakat tanah gambut tersebut dijadikan tanah pertanian seperti kelapa sawit dan sayur-sayuran, sedangkan tanah yang berlumpur ditanami padi. Disamping itu juga, daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 3-4 M dari permukaan laut

## **2. Demografis**

Berdasarkan data statistik yang terkumpul pada tahun 2008 bahwa penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur tersebut berjumlah adalah 12.367 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: Laki-laki berjumlah 6.496 jiwa, sedangkan Perempuan berjumlah 5.871 jiwa, dengan jumlah 12.367 jiwa. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat tabel, yaitu klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur.

---

<sup>1</sup> Sumber Data Kantor Camat Bukit Kapur Kotamadya Dumai, Tahun 2008

**TABEL I**  
**KONDISI PENDUDUK KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT**  
**KAPUR BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	6.496 jiwa	52.5 %
2	Perempuan	5.871 jiwa	47.5 %
<b>Jumlah</b>		<b>12.367 jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur tahun 2008 jumlah penduduk 12.367 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 2.707, dengan perincian laki-laki sebanyak 6.496 jiwa atau 52.5 % dan perempuan sebanyak 5.871 jiwa atau 47.5 %. Dengan kondisi ini menunjukkan perkembangan penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur lebih cepat laki-laki daripada perempuan.

Maka daripada itu, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur berjumlah 12.367 jiwa dengan berbagai variasi umur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II**  
**KONDISI PENDUDUK KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN**  
**BUKIT KAPUR BERDASARKAN TINGKAT UMUR**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	13 tahun ke bawah	1.124 Jiwa	9.1 %
2	14 – 18 tahun	1.837 Jiwa	14.8 %
3	19 – 25 tahun	3.452 Jiwa	27.9 %
4	26 – 45 tahun	4.385 Jiwa	35.4 %
5	46 – 57 tahun	981 Jiwa	8.0 %
6	57 tahun ke atas	588 Jiwa	4.8 %
<b>Jumlah</b>		<b>12.367 jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mayoritas usia 26 – 45 tahun lebih banyak dan menempati urutan yang pertama dengan jumlah 4.385 jiwa atau 35.4 %, usia 19 – 25 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah 3.452 jiwa atau 27.9 %, dan usia-usia lain menempati urutan berikutnya.

## **B. Sosial Budaya**

Budaya yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur adalah Budaya Melayu. Kata Melayu berasal dari kata *Mala* (yang berarti mula) dan *Yu* (berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang berarti Negeri Gangga.<sup>2</sup> Melayu adalah salah satu suku bangsa dari sejumlah suku bangsa di Indonesia. Orang melayu sesuai dengan alam, lingkungan dan kemampuan

---

<sup>2</sup> UU Hamidy, *Orang Melayu di Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, 1996) Cet.ke-1, h. 11

manusia (*cipta, rasa dan karsa*). Budaya Melayu sebagai kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang dari sejak dahulu kala, termasuk salah satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai kini, dan bahasa melayu salah satu unsur budaya melayu sudah menjadi bahasa nasional. Budaya sebagai salah satu bagian dari budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara telah menunjukkan identitasnya yang khas dari semenjak dahulu sampai sekarang.<sup>3</sup> Dalam pertumbuhannya, Kebudayaan Melayu mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai-nilai Islam juga turut mengisi dan memberi corak terhadap Kebudayaan Melayu. Dengan demikian, kebudayaan Melayu di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dilandasi dan banyak diangkat dari nilai-nilai Islam, itu sangat menguasai dimensi budaya orang Melayu.

Masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur di samping sebagai masyarakat adat, mereka juga ta'at menajalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas dan kreativitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti melaksanakan sholat secara berjamaah serta adanya kegiatan pengajian dan wirid yasinan yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu.<sup>4</sup>

Meskipun di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mayoritas penduduknya bersuku Melayu, namun ada juga suku lain yang berdomisili di daaerah

---

<sup>3</sup> Suwardi MS, *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*, (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-Riau, 1991) Cet. ke-1, h. 28

<sup>4</sup> Pak Johari, Warga Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, *wawancara*, Desember 2008

ini, seperti suku Jawa, Minang, Batak dan Cina. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL III**  
**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN BUKIT NENAS**  
**KECAMATAN BUKIT KAPUR MENURUT SUKU**

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	6.612	53.4 %
2	Jawa	2.240	18.1 %
3	Minang	870	7.1 %
4	Batak	683	5.6 %
5	Cina	1.962	15.8 %
<b>Jumlah</b>		<b>12.367</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Melayu merupakan suku yang terbesar di Kelurahan Bukit Nenas, yaitu berjumlah 6.612 jiwa atau 53.4 %, suku Jawa berjumlah 2.240 jiwa atau 8.1 %, suku Minang berjumlah 870 atau 7.1 %, suku Batak berjumlah 683 atau 5.6 %, sementara suku Cina dengan jumlah 1.962 jiwa atau 15.8 %.

### **C. Sosial Ekonomi**

Kelurahan Bukit Nenas merupakan daerah industri, maka tidak heran banyak penduduk yang berdatangan dari luar daerah. Mereka hadir untuk menjadi pekerja industri. Namun ada pula yang datang sebagai pedagang, seperti membuka warung, toko barang harian, pelayanan kecantikan dan lain sebagainya. Diantara penduduk yang datang dari luar tercatat warga keturunan Jawa, Minang, dan Batak. Berdasarkan

keterangan dari kelurahan, mereka datang setelah hadirnya industri baru di daerah ini. Bila dilihat dari pekerjaan penduduk pendatang dapat menjadi dua kelompok, *pertama* kelompok yang langsung bekerja di industri yaitu industri ubi yang sudah lazim dikenal bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ataupun bagi pendatang, karena di daerah ini khas industrinya adalah kerupuk cabe. Selain itu, sebagian juga bekerja di industri minyak seperti di Pertamina dan BKR, sedangkan kelompok *kedua* yaitu mereka yang diperlukan oleh kehadiran industri-industri tersebut.

Dari gambaran di atas, masyarakat Kelurahan Bukit Nenas termasuk masyarakat industri, umumnya telah mempunyai rasa sosial yang cukup baik. Hal ini terlihat dalam segala aspek kehidupan masyarakat baik yang berkenaan dengan kehidupan pribadi maupun yang menyangkut kehidupan kekeluargaan dan masyarakat. Tali keakraban di atas dapat dilihat dalam organisasi sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Adapun organisasi sosial yang sifatnya tradisional seperti perkumpulan kematian, pengajian, dan gotong royong. Sedangkan organisasi sosial yang termasuk organisasi sosial modern seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang diketahui oleh ibu kelurahan, darma wanita dan arisan, terutama yang berstatus pegawai, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta. Di samping kegiatan di atas, masih ada organisasi lainnya seperti LKMD, Karang Taruna dan organisasi kesenian.

Melihat dari segi sosial ekonomi Kelurahan Bukit Nenas dapat penulis kemukakan bahwa dari segi mata pencaharian penduduk Kelurahan Bukit Nenas secara



garis besar mempunyai mata pencaharian yang bervariasi sesuai dengan potensi alam yang tersedia serta sumber daya manusia yang terdapat di daerah ini. Pada umumnya bergerak di bidang swasta, serta sebagian kecil masyarakat yang bergerak di sektor-sektor lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL IV**  
**KONDISI PENDUDUK KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN**  
**BUKIT KAPUR BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Belum Bekerja	152	1.9 %
2	Karyawan	1.349	16.0 %
3	Pedagang	1.505	17.8 %
4	Wiraswasta	1.548	18.4 %
4	Tani	1.927	22.9 %
5	Pertukangan	84	1.0 %
6	Pensiunan	69	0.9 %
7	PNS	1.560	18.5 %
8	TNI/Polri	217	2.6 %
<b>Jumlah</b>		<b>8.411</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yang belum bekerja seperti anak masih kecil maupun yang masih dibangku pendidikan dengan jumlah 152 orang atau 1.9 %, karyawan berjumlah 1.349 orang atau 16.0 %, pedagang berjumlah 1.505 orang atau 17.8 %, wiraswasta berjumlah 1.548 orang atau 18.4 %, tani berjumlah 1.927 atau 22.9 %, pertukangan berjumlah 84 orang atau 1.0 %, pensiunan berjumlah 69 orang atau 0.9 %, PNS berjumlah 1.560 orang atau 18.5 %, TNI/Polri berjumlah 217 orang atau 2.6 %.

PNS berjumlah 1.560 orang atau 18.5 %, dan TNI/Polri berjumlah 217 orang atau 2.6 %. Maka jumlah terbesar penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur adalah yang bekerja sebagai petani dan menempati urutan pertama. PNS menempati urutan yang kedua, serta yang lainnya menempati urutan berikutnya.

#### **D. Agama**

Agama merupakan suatu petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku serta pergaulan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pentingnya agama dalam kehidupan manusia, merupakan suatu pola akidah yang mencakup unsur kepercayaan, sosial dan tindakan emosional. Baik yang menyangkut hubungan dengan Khalik (Allah) maupun segala bentuk yang berhubungan dengan hamba-Nya (manusia).

Agama-agama yang dianut masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari berbagai agama yakni, agama Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu dan Budha. Diantara agama yang ada tersebut, mayoritas yang dianut masyarakat Kelurahan Bukit Nenas tersebut adalah agama Islam. Untuk lebih jelasnya pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL V**  
**KLASIFIKASI PEMELUK AGAMA**  
**KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT KAPUR**

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	7.987 Jiwa	64.5 %
2	Katolik	892 Jiwa	7.3 %
3	Protestan	1.390 Jiwa	11.3 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	2.098 Jiwa	16.9 %
<b>Jumlah</b>		<b>12.367 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Dari tabel di atas menunjukkan dari 12.367 penduduk berdasar jumlah agama dapat diketahui 7.987 jiwa atau 64.5 % adalah beragama Islam, 892 jiwa atau 7.3 % adalah beragama katolik, 1.390 jiwa atau 11.3 % adalah protestan, sedangkan penganut agama Hindu tidak dijumpai di daerah ini, serta 2.098 jiwa atau 16.9 % adalah beragama Budha. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dilihat dari jumlah agama yang mayoritas adalah beragama Islam.

Berdasarkan data yang ada di kantor Lurah Bukit Nenas mayoritas penduduk beragama Islam. Penduduk kelurahan ini termasuk taat menjalankan agama. Hal ini terbukti di samping aktif melaksanakan kewajiban ibadah, juga aktif melaksanakan wirid pengajian baik kaum ibu-ibu, remaja maupun wirid umum. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur adalah sebagai berikut :

1. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap sore jum'at.
2. Wirid pengajian umum dilaksanakan setiap jum'at malam sabtu setelah shalat maghrib.
3. Membaca yasin bersama di masjid atau mushalla setiap kamis malam jum'at setelah shalat maghrib.
4. Wirid remaja sekali dalam seminggu.

Semua wirid tersebut di atas, dilaksanakan di masjid atau di mushalla oleh jema'ah yang ada di sekitar rumah ibadah tersebut. Kegiatan lain yang lazim dilaksanakan seperti peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi SAW., Isra' dan Mi'raj, serta tahun baru Islam. Pada peringatan tersebut terkadang diadakan perlombaan seperti Mushabaqah Tilawatil Qur'an baik tingkat RT, maupun masjid atau mushalla yang ada di kelurahan tersebut dengan tujuan menyemarakkan peringatan hari besar umat Islam.

Meskipun penganut agama non-muslim termasuk minoritas di daerah ini, ketentrangan melaksanakan ajaran agama masing-masing berjalan dengan baik, khususnya bagi agama non-muslim mereka melaksanakan upacara keagamaan yang bersifat upaca kebaktian yang dilakukan setiap minggunya. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah tempat ibadah yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VI**  
**KLASIFIKASI RUMAH IBADAH**  
**KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT KAPUR**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushalla	3
3	Gereja	2
4	Vihara	-
5	Pura	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ibadah yang ada Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dapat dikatakan lebih dari cukup apabila dibandingkan dengan jumlah yang bergama non-muslim seperti tabel di atas dapat kita lihat, masjid sebanyak 8 buah dan mushalla sebanyak 3 buah, kemudian gereja sebanyak 2 buah.

#### **E. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Keadaan pendidikan di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat Sekolah Menengah Atas berjumlah 10 buah, dan lebih dari separuhnya dikelola oleh swasta. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah ini cukup tinggi kesadaran mereka kepada pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, dengan banyaknya sekolah-sekolah yang dikelola oleh pihak swasta di daerah ini menunjukkan pula bahwa tingkat swadaya masyarakat untuk memajukan pendidikan cukup tinggi, yang sudah barang tentu membantu meringankan beban pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya untuk mengetahui sarana lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL VII**  
**KLASIFIKASI LEMBAGA PENDIDIKAN PENDUDUK**  
**KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT KAPUR**

<b>No</b>	<b>Lembaga Pendidikan</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Jumlah</b>
1	Taman Kanak-kanak	-	1	1
2	SD / Sederajat	4	-	4
3	SLTP / Sederajat	1	1	2
4	SLTA / Sederajat	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Adapun hubungan antara jumlah lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik yang ada di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL VIII**  
**KLASIFIKASI PENDIDIKAN PENDUDUK**  
**KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT KAPUR**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Belum Sekolah	823	6.7 %
2	Tidak Tamat SD	972	7.9 %
3	SD / Sederajat	2.537	20.5 %
4	SLTP / Sederajat	2.952	23.8 %
5	SLTA / Sederajat	2.821	22.8 %
6	Akademi / Sederajat	1.610	13.0 %
7	Perguruan Tinggi	652	5.3 %
<b>Jumlah</b>		<b>12.367</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: (Kantor Lurah Bukit Nenas Tahun 2008)

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang pernah dicapai masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dapat dikategorikan relatif tinggi. Adapun persentase tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Dengan demikian program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur sebagaimana yang diprogramkan pemerintah sudah dapat dikatakan tercapai.

Meskipun terdapat sebahagian dari masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yang belum mengecap pendidikan formal yang pada umumnya mereka terdiri dari balita dan sebagian lainnya adalah lanjut usia. Sementara yang lainnya sudah melewati pendidikan sampai di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

## **F. Adat Istiadat**

Adat adalah suatu ketentuan atau aturan yang dibiasakan dalam suatu masyarakat dan biasanya diberi sanksi bagi yang melanggarnya. Budaya yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur adalah budaya Melayu yang berasal dari kata “*mala*” yang berarti mula dan “*yu*” yang berarti negeri. Melayu adalah salah satu suku bangsa di Indonesia. Melayu sebagai kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang dari sejak zaman dahulu kala. Kini bahasa Melayu adalah salah satu unsur budaya Melayu menjadi bahasa nasional.

Budaya Melayu sebagai salah satu bagian dari budaya “yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara telah menunjukkan identitasnya yang khas dari semenjak dahulu sampai sekarang”. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan Melayu mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai-nilai Islam juga turut mengisi dan memberikan corak terhadap kebudayaan Melayu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya Melayu identik dengan Islam. Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Bukit Nenas, apabila seseorang keluar dari agama Islam maka dengan sendirinya dia telah keluar dari suku Melayu dan hubungan orang tersebut dengan keluarga dan sukunya telah terputus. Hal ini terjadi karena orang tersebut dipandang telah melanggar adat istiadat itu sendiri. Kebudayaan Melayu di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dilandasi dan banyak diangkat dari nilai-nilai Islam. Ini dapat dilihat pada acara perkawinan dan khitanan anak, pada acara tersebut dilaksanakan secara adat dan agama. Mereka yang khitanan terlebih dahulu melaksanakan khatam Al-Qur'an, pada



acara tersebut juga dilaksanakan acara kenduri dan doa selamat. Pembaharuan antara budaya Melayu dan ketentuan ajaran Islam dapat terlihat jelas pada pelaksanaan acara perkawinan. Perkawinan dan pertunangan dalam masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur diawali dengan merisik, meminang, masa pertunangan, antar belanja, dan walimah baik menurut adat istiadat maupun menurut agama Islam. Adapun yang datang untuk melakukan pertunangan adalah dari pihak laki-laki.

Karena suku yang mayoritas adalah Melayu, maka kebudayaan Melayu merupakan budaya dan tradisi yang selalu menjadi corak budaya setempat dan dapat melindungi suku-suku yang lainnya yang ada di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sudah terjadi pembauran antara masing-masing suku. Dengan demikian mereka akan selalu hidup berdampingan dan selalu rukun, dan walaupun ada pertengkaran dan percekocokan antara suku dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI**

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan/ perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan/ perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan/ perkawinan adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.<sup>1</sup>

#### **A. Pengertian Nikah Sirri (Nikah di Bawah Tangan)**

Nikah *Sirri* atau disebut nikah di bawah tangan. Nikah *sirri* cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah *sirri* biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya juga untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.<sup>2</sup>

Kata *sirri* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *assirru* yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Faridl, pengertian nikah *sirri* terdapat dua kemungkinan, yaitu *Pertama*, nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 7

<sup>2</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 84

dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). *Kedua*, nikah *sirri* yang mengandung arti sembunyi atau tidak dipublikasikan, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan fitnah, buruk sangka terhadap yang bersangkutan yaitu suami atau istri. Dan dilain pihak mengatakan bahwa nikah *sirri* (di bawah tangan) adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencatatan maupun pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindar dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).<sup>3</sup>

Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqh Maliki, nikah *sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jemaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini, nikah *sirri* adalah tidak sah, sebab nikah *sirri* selain dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudz-dzan*, juga bertentangan bertetangan dengan hadits Rasulullah SAW.,<sup>4</sup> yang berbunyi :

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
: وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. (رواه  
البخارى)

---

<sup>3</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar ?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), Cet. ke-1, h. 5

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 36

Artinya : “Dari Anas r.a. ia berkata Rasulullah saw bersabda: “Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing.” (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

Menurut Aulawi, sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan, di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah *sirri*. Pengertian nikah *sirri* mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah *sirri* menjadi tiga bagian :

1. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
3. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya,

---

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-3, h. 84

dan pejabat yang berwenang serta izin Pengadilan Agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.<sup>6</sup>

## **B. Nikah Sirri (Nikah di Bawah Tangan) Menurut Persepsi Fiqih**

Dalam sejarah hukum Islam, nikah *sirri* bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah *sirri* ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

هذا نكاح السر، ولا اجيزه لو كنت تقدمت لرجمت.

(مالك)

“Ini nikah *sirri*, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.” (Imam Malik).

Umar telah melarang nikah *sirri*. Karena didasarkan adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan.

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i, tidak membolehkan nikah *sirri*. Sehingga nikah *sirri* menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah *sirri* dan harus di fasakh. Namun

---

<sup>6</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 37

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.<sup>7</sup>

Setelah memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa nikah *sirri* itu bersangkut-paut dengan kedudukan saksi nikah dan syarat-syarat pada saksi itu sendiri.

Dengan memperhatikan tentang syarat sahnya nikah, maka saksi itu berkedudukan sebagai syarat sahnya nikah, bukan syarat *tamam* (penyempurna). Maka waktu berlangsungnya akad nikah tersebut minimal harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki muslim.

Dalam akad nikah, kurang tepat kalau saksi nikah dicukupkan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dengan mengambil saksi alternatif dan dua orang laki-laki beralih kepada saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan berarti menurunkan derajat akad nikah.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, saksi nikah pada pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) menerangkan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Cet. ke-1, h. 31-32

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 34

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), Cet. ke-1, h. 29

Berdasarkan bunyi *diktum* di atas, bahwa kedudukan saksi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai rukun. Ini berarti bahwa saksi itu merupakan unsur atau bagian dari pelaksanaan akad nikah yang mesti ada.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa jumlah saksi harus dua orang. Mengenai syarat-syarat saksi ditegaskan di dalam pasal (25): mengenai jenis kelamin dari saksi ialah laki-laki muslim.

Dengan adanya ketentuan tentang saksi nikah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas (harus laki-laki) maka ini memberi isyarat bahwa kondisi obyektif di Indonesia, untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dalam akad nikah tidak merupakan kesulitan—apalagi darurat. Karena itu, saksi nikah yang diharuskan hadir dalam pelaksanaan akad nikah pastilah laki-laki.

Jadi, nikah *sirri* dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Kalau terjadi nikah *sirri* harus difaskh oleh hakim. Anak yang lahir dari nikah *sirri* nasabnya dihubungkan kepada ibunya.<sup>10</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Nikah Sirri (Nikah di Bawah Tangan)**

1. Perkawinan Gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundangan-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Sujari Dahlan, *op.cit.*, h. 35

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. ke-4, Ed. 1, h. 71

2. Perkawinan Liar, yaitu perkawinan /nikah di bawah tangan tersebut oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftar atau dicatat pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>12</sup>
3. Perkawinan Secara Sembunyi-sembunyi. Salah satu alternatif yang sering dipikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan *nikah sirri*. Ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah *sirri* ini diantaranya *Pertama*, nikah *sirri* adalah pernikahan sebagaimana yang biasa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. *Kedua*, sebagian saudara kita memahami nikah *sirri* sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.<sup>13</sup>
4. Perkawinan Sipil, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.<sup>14</sup>
5. Perkawinan (nikah) Gantung, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya sebagai suami-istri digantungkan pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. ke-1, h.187

<sup>14</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. ke-2, h. 142



suatu keadaan atau waktu di masa yang akan datang. Menurut Hadikusumo, nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, namun suami-istri belum tinggal serumah dan hidup bersama sebagai suami-istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sementara anak laki-laki telah dewasa, sehingga untuk hidup bersama sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL I**  
**PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP**  
**BENTUK-BENTUK NIKAH SIRRI**

No	Alternatif	Jumlah	Persentase
1	Perkawinan Liar	-	- %
2	Perkawinan Sembunyi-sembunyi	13	86.6 %
3	Perkawinan Sipil	-	- %
4	Perkawinan (nikah) Gantung	2	13.4 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden banyak yang tidak mengetahui bentuk-bentuk nikah *sirri* itu sendiri. Kebanyakan daripada responden hanya mengetahui yang sering atau lazim disebut-sebut orang seperti nikah secara sembunyi-sembunyi, hal ini sesuai dengan jumlah 13 orang atau 86.6 %, adapula masyarakat

---

<sup>15</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 38

Kelurahan Bukit Nenas tersebut yang menyatakan nikah sirri itu adalah nikah gantung, ini berjumlah 2 orang atau 13.4 %.

#### **D. Kemaslahatan Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapatkan salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan suami-istri dalam rumah tangga atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan Akta tersebut, suami-istri memiliki bukti *otentik* atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Dalam undang-undang perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>16</sup>

Banyak daripada masyarakat itu mengetahui tentang pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan. Seperti pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran (bukti lahir). Akan tetapi, semuanya itu tidak lepas dari birokrasi yang serba menyulitkan, sehingga daripada masyarakat enggan mengurus akta-akta resmi (surat keterangan tersebut. Salah satunya di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**TABEL II**  
**PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP BENTUK-BENTUK**  
**PENCATATAN SUATU PERISTIWA HUKUM**

<b>No</b>	<b>Alternatif</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Pencatatan Kelahiran	7	46.7 %
2	Pencatatan Perkawinan	7	46.7 %
3	Pencatatan Kematian	1	6.6 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden banyak yang mengetahui bentuk-bentuk pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Seperti pencatatan kelahiran, ini sesuai dengan jumlah 7 orang atau 46.7 %, masalah pencatatan perkawinan berjumlah 7 orang atau 46.7 %, dan adapula yang mengetahui masalah pencatatan kematian, ini berjumlah 1 orang atau 6.6 %.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 44

Pencatatan perkawinan/pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Artinya mendaftar secara resmi mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hal ini di samping sebagai niat baik bersama antara calon istri dan suami juga untuk memudahkan segala urusan-urusannya. Selain daripada itu yang sangat penting adalah untuk menghindari buruk sangka dari orang lain terhadap perkawinan/pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Perkawinan/pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>18</sup> Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu 2 (dua) orang wanita (*lesbian*) atau 2 (dua) orang pria (*homo seksual*), serta perkawinan yang dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria.<sup>19</sup>

Sehingga dalam melangsungkan perkawinan/pernikahan perlu diadakan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), demi kemaslahatan hukum bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut, terutama bagi kaum wanita. Artinya, kaum wanita yang bersangkutan terlindung hak asasinya, tidak dilecehkan. Menurut

---

<sup>17</sup> Lukman A. Irfan, *op.cit.*, h. 85

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-1, h. 203

<sup>19</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2, h. 242

hukum positif Indonesia, nikah *sirri* itu tidak diakui sama sekali, karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Sehingga dalam struktur Kantor Urusan Agama (KUA) itu ada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang kita sebut dengan penghulu. Penghulu bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan. Penghulu yang menikahkan biasanya diminta oleh wali atau orang tua mempelai untuk menggantikannya menikahkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lukman A. Irfan, *op.cit.*, h. 85

**BAB IV**  
**NIKAH SIRRI DAN MOTIVASI DITINJAU MENURUT**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Pelaksanaan Nikah Sirri pada Masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas  
Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.**

Pada umumnya masyarakat yang hidup di pedesaan atau yang jauh dari Kecamatan, sulit untuk mengetahui atau mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku karena kurangnya perhatian dari aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan tentang hukum, terutama menyangkut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini. Sehingga kurangnya perhatian dari aparat pemerintah untuk mensosialisasikan pemberlakuan undang-undang ini, menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku.

Maka daripada itu, Allah SWT tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling redha-meredhai, dengan upacara akad nikah yang dihadiri para saksi untuk menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang telah saling terikat. Bentuk pernikahan (perkawinan) ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri manusia, memelihara

keturunan dengan baik dan menjaga martabat manusia, terutama bagi kaum perempuan.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwasanya nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencatatan maupun pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak memperoleh akta nikah.

Dalam hal ini, banyak dari penduduk masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur tersebut yang melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri*) dan tidak memiliki akta nikah. disebabkan pernikahannya itu yang disahkan oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz, bahkan imam-imam masjid yang mereka pandang telah mengetahui hukum-hukum tentang pernikahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL I**  
**JAWABAN RESPONDEN TERHADAP AKTA NIKAH**

No	Alternatif	Jumlah	Persentase
1	Mempunyai Akta Nikah	3	20.0 %
2	Tidak mempunyai Akta Nikah	10	66.6 %
3	Tidak memikirkan Akta Nikah	2	13.4 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden banyak yang tidak mempunyai akta nikah, kesemuanya itu disebabkan banyaknya pendatang yang bekerja,

---

<sup>1</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), Cet. ke-2, h. 1

menetap, dan berkeluarga. Sehingga mengambil jalan pintas melakukan pernikahan di bawah tangan (*sirri*) melalui ulama/ustadz/imam masjid, hal ini sesuai dengan jumlah 10 orang atau 66.6 %, yang mempunyai akta nikah adalah sebanyak 3 orang atau 20.0 %, dan ada yang tidak ambil pusing atau tidak memikirkan akta nikah itu sendiri, ini berjumlah sebanyak 2 orang atau 13.4 %.

Nikah *sirri* atau juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah dilakukan dengan cara rahasia. Sesuai dengan kenyataan bahwa pernikahan (perkawinan) rahasia di dalamnya terdapat keumuman dan kekhususan, dan pada dasarnya perkawinan rahasia terlaksana karena secara diam-diam dan tidak ada pemberitaan.<sup>2</sup>

Nikah *sirri* merupakan pernikahan (perkawinan) yang dilaksanakan secara fiqh, tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bersangkutan, dan tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu biasanya belum diadakan pesta perkawinan (walimah). Nikah semacam ini kalau dilihat dari sudut fiqh sudah bukan *sirri* lagi. Tetapi kalau dilihat dari hukum perundangan memang masih merupakan rahasia atau *sirri*.

Meskipun sudah ada undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ternyata nikah *sirri* dalam arti tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetap saja ada. Yang menarik perhatian sekarang ini, kasus semacam itu semakin

---

<sup>2</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alumaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. ke-2, h. 142



sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah *sirri* adalah alim ulama atau orang yang mereka pandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan). Alasan pernikahan *sirri* biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah-tangga, atau karena masing-masing masih mempunyai tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan sementara kalangan berpendapat, nikah *sirri* merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus kepada hal-hal yang dilarang agama.<sup>4</sup>

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita.<sup>5</sup> Tentu sesuai dengan aturan ajaran agama Islam dan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> M. Sudjari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Cet. ke-1, h. 36

<sup>4</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 22

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 11

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syuura ayat 11 yang berbunyi :

فاطر السموات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا.  
(الشورى : ١١)

Artinya : “ (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan . . .” (QS. Asy-Syuura: 11)<sup>6</sup>

Sehingga banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan pada masyarakat sekarang ini yang berhubungan dengan pernikahan (perkawinan), yaitu masalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau disebut dengan nikah *sirri*, karena ada sebab-sebab, baik karena pernikahan tanpa persetujuan orang tua, tidak adanya persetujuan dari istri pertama, sulitnya birokrasi pernikahan, hamil duluan sebelum menikah atau hamil di luar nikah, dan lain sebagainya.

Disini akan penulis kemukakan beberapa kasus tentang pelaksanaan Nikah *sirri* pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.

1. Pernikahan Wahono seorang Kuli Bangunan yang berusia 30 tahun, dengan istrinya Susi seorang Guru Sekolah Dasar (SD) yang berusia 25 tahun, dilaksanakan pada tahun 1998 di Kelurahan Bukit Nenas. Pernikahan ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari keluarga perempuan yang hanya memandang status dan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 784

pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi agar tercapai keinginannya sebagai suami-istri dan bisa hidup berasama.<sup>7</sup>

2. Pernikahan Boyamin seorang yang berusia 35 tahun, dengan Tuti yang berusia 25 tahun, pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2008 di rumah seorang Ulama (Imam Masjid), mereka dinikahkan oleh seorang wali dari permuka masyarakat dengan alasan orang tua jauh, dan Boyamin menikahi Tuti secara *sirri*, sedangkan Boyamin sudah berkeluarga tetapi dari pernikahan pertama tidak memiliki anak, tanpa persetujuan istri pertama Boyamin melakukan pernikahan *sirri*.<sup>8</sup>
3. Pernikahan Zulfen seorang yang berusia 28 tahun dengan Azriyah yang berusia 24 tahun, pernikahan ini dilaksanakan pada tahun 2007 secara *sirri*, pernikahan ini dilatarbelakangi dari tidak adanya persetujuan orang tua dari pihak perempuan, alasannya karena Zulfen seorang pemuda pengangguran, dikarenakan hubungan mereka saling cinta mencintai akhirnya mereka berani mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan nikah *sirri*.<sup>9</sup>
4. Pernikahan Arifin seorang yang berusia 26 tahun dengan Khadijah yang berusia 22 tahun, pernikahan ini dilaksanakan pada tahun 2006 secara *sirri* dan pernikahan ini terjadi karena sulitnya birokrasi pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak mendapatkan izin dari orang tua kandung, sedangkan dari KUA setempat meminta rekomendasi dari orang tua kandung, dikarenakan kurangnya pemahaman Arifin

---

<sup>7</sup> Wahono, (30 tahun) warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 24 September 2009

<sup>8</sup> Boyamin, (35 tahun) warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 27 September 2009

<sup>9</sup> Zulfen, (28 tahun) warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 29 September 2009

sehingga mengatakan birokrasi itu sulit, akhirnya Arifin melakukan pernikahan secara *sirri* dengan pasangannya.<sup>10</sup>

5. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Salman, yang berumur 27 tahun dengan Zuraidah berumur 22 tahun dan pernikahan *sirri* ini terjadi pada bulan Desember 2008. Alasan pernikahan *sirri* ini terjadi disebabkan karena Zuraidah hamil di luar nikah dan peristiwa ini diketahui oleh warga setempat, dikarenakan rasa malu akhirnya mereka melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau istilah zaman sekarang adalah nikah *sirri*.<sup>11</sup>

Salah satu alternatif yang sering dipikirkan oleh masyarakat yang ingin menikah adalah melakukan nikah *sirri* (bawah tangan). Ada dua asumsi yang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah, **Pertama**, nikah *sirri* (bawah tangan) adalah pernikahan sebagaimana yang biasa terjadi, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, syarat dan rukun nikahnya sebagaimana yang ditentukan oleh syariat agama sudah terpenuhi. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bila sewaktu-waktu terjadi masalah. **Kedua**, sebagian masyarakat memahami nikah *sirri* (bawah tangan) sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, tanpa wali dan saksi. Sementara itu, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Arifin, (26 tahun) warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 30 September 2009

<sup>11</sup> Salman, (27 tahun) warga masyarakat, *wawancara*, tanggal 01 Oktober 2009

<sup>12</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. ke-1, h. 187

Jika seseorang yang ingin melakukan nikah *sirri* (bawah tangan), ada baiknya kita berdiskusi sejenak. Marilah kita ingat ketika Rasulullah saw bersabda :

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه  
بالدفوف. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya : “Umumkanlah pernikahan ini, adakanlah dalam masjid, serta meriahkanlah dengan pukulan rebana.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Hadits di atas secara tegas meminta kepada kita semua untuk mengumumkan pernikahan (*i'lan*) sehingga masyarakat secara luas mengetahui pernikahan kita. Agar gaungnya lebih besar, kalau perlu diumumkan pernikahan dengan menyelenggarakan acara untuk memeriahkan pengumuman tersebut. Dan salah satu hikmah mengumumkan pernikahan (perkawinan) adalah menghindarkan seseorang dari fitnah, menjauhkan masyarakat dari prasangka yang buruk dan anggapan negatif. Misalnya, jika sewaktu-waktu terjadi masalah karena suami atau istri mengingkari pernikahan, masyarakat dapat menjadi saksi yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang sah. Berdasarkan kesaksian masyarakat tersebut, hakim dapat mengambil keputusan secara tepat dan adil.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan urusan pernikahan (perkawinan), ada beberapa hal yang membuat seseorang harus memperhatikan tentang nikah *sirri* (bawah tangan) itu sendiri, diantaranya :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 188-189

1. Sistem yang ada di masyarakat sekarang ini tidak memberi perlindungan, sehingga apabila sewaktu-waktu seorang suami atau seorang ayah mengingkari kewajibannya, maka seorang istri tidak dapat berbuat apa-apa.
2. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tanpa ada legalitas formal yang dapat dipercaya, kita tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat yang seharusnya tidak terjadi. Seorang istri tidak dapat menjamin bahwa suaminya masih hidup ketika dia melahirkan seorang anak, sedangkan anak membutuhkan bukti bahwa ia lahir sebagai anak yang sah, bukan anak hasil dari perzinaan.
3. Rasulullah saw. telah meminta kepada umatnya untuk mengumumkan pernikahan.<sup>14</sup>

Dari beberapa kasus nikah *sirri* yang penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum nikah *sirri* yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur pada umumnya dilakukan masyarakat berdasarkan alasan-alasan yang tidak harus terjadinya pernikahan secara *sirri*, akan tetapi dikarenakan keegoan dan keinginan masyarakat terlalu tinggi maka terjadilah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*sirri*).

#### **B. Faktor Penyebab Nikah Sirri pada Masyarakat di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai.**

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan (perkawinan) sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan (perkawinan) yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 192

perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.<sup>15</sup>

Nikah *sirri* (di bawah tangan) tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat yang berpendidikan rendah, melainkan juga banyak dijumpai pada lingkungan masyarakat yang tergolong berpendidikan tinggi. Selanjutnya nikah *sirri* (di bawah tangan) tidak hanya dijumpai di wilayah pedesaan, melainkan juga dapat dijumpai di wilayah perkotaan, bahkan di lingkungan masyarakat perguruan tinggi. Dan kelihatannya nikah *sirri* (di bawah tangan) sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.<sup>16</sup>

**TABEL II**  
**TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN YANG MEMPENGARUHI**  
**TERJADINYA NIKAH SIRRI**

No	Alternatif	Jumlah	Persentase
1	SD	9	60.0 %
2	SLTA	4	26.6 %
3	Perguruan Tinggi	2	13.4 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor pendidikan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan secara sirri, hal ini yang terjadi pada masyarakat

---

<sup>15</sup> Depag RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 7

<sup>16</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar ?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), Cet. 1, h. 74

Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai, yaitu 9 responden atau 60.0 % yang melakukan nikah *sirri* adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), 4 responden atau 26.6 % yang melakukan nikah *sirri* adalah tamatan SLTA, dan 2 responden atau 13.4 % yang melakukan nikah *sirri* adalah tamatan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa yang dapat mempengaruhi nikah *sirri* adalah pendidikan dari responden itu sendiri.

Selain daripada itu, terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara *sirri*, diantaranya adalah :

1. Menurut **Mustofa**, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah *sirri* (di bawah tangan) disebabkan oleh dua faktor, yaitu : *Pertama*, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama; tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama. Alasan *Kedua*, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama.
2. Menurut **Ali**, yang menyatakan bahwa faktor terjadinya nikah *sirri* (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan di Indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Selain itu, mahalnya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasan lainnya.
3. Menurut **Aulawi**, faktor penyebab terjadinya nikah *sirri* (di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqh yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.



4. Menurut **Irfa'i**, faktor lain penyebab nikah *sirri* (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara untuk sahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syara' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (*walimatul al ursy*). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama karena belum tersedianya dana, maka dilakukanlah nikah *sirri* (di bawah tangan).<sup>17</sup>

Ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari nikah *sirri* (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Banyak nikah *sirri* (di bawah tangan) yang dilakukan salah satunya karena keleluasaan yang diberikan oleh pihak keluarga dan masyarakat, yang mengaggap nikah *sirri* (di bawah tangan) sebagai suatu kegiatan biasa yang secara agama memang sah untuk dilakukan. Selain itu, adanya kelonggaran yang diberikan aparat pemerintah dalam hal pencatatan pernikahan juga menjadi faktor pendukung adanya nikah *sirri* (di bawah tangan).

### **1. Faktor Ekonomi**

Nikah *sirri* (di bawah tangan) yang hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sehingga pernikahan (perkawinan) tersebut banyak menimbulkan masalah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 41

bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari nikah *sirri* (di bawah tangan) antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan kepada istri, laki-laki (suami) dapat dengan mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan oleh perempuan yang dinikahi secara *sirri*, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

Adapun menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Wanita, sebenarnya kasus yang muncul sebagai akibat dari nikah *sirri* (di bawah tangan) dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Tampak dengan jelas bahwa dalam nikah *sirri* (di bawah tangan) hak-hak perempuan sebagai istri tidak terlindungi oleh hukum. Secara psikologis, dia menderita karena diabaikan terutama jika laki-laki tidak mengakui pernikahannya atau anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* (di bawah tangan). Dalam hal ekonomi, perempuan akan dirugikan terutama dalam hak mendapatkan nafkah dan waris untuk anaknya, karena secara tertib administratif untuk mendapatkan nafkah dan waris harus ada bukti tertulis.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Birokrasi

Selanjutnya, bila dipermasalahkan tentang nikah *sirri* (di bawah tangan), mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah : “Apakah sah pernikahan (perkawinan) yang dilakukan secara *sirri* atau di bawah tangan ?”.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 6-7

Bila kita terpaku hanya kepada pertanyaan itu saja dan memberikan jawabannya tentulah dianggap masalah sepele, tidak prinsipal, soal kecil, tidak begitu penting dan dengan mudah menjawab “sah” atau “tidak sah”.

Pertanyaan ini termasuk bidang hukum perkawinan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang merupakan metode masa kini yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Ilmu Hukum, cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyeludupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki.<sup>19</sup>

Inilah yang menjadi problema hukum yang barangkali tidak terpikirkan oleh orang-orang Islam pada waktu menikahkan anak perempuan mereka yang dilakukan secara *sirri* (di bawah tangan), secara agama mungkin sah. Akan tetapi, disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 42

dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus menangani permasalahan tersebut.

### **3. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Disitulah bentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur :

Keluarga sangat mempengaruhi terhadap kehidupan seseorang, apalagi yang menyangkut masalah ekonomi keluarga. Misalnya banyak yang terjadi sekarang ini dalam perjodohan anak yang terputus akibat ekonomi dan materi dari pihak lainnya. Terkadang anak sudah terlanjur mencintai antara satu dengan lainnya, akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari orang tua, dan kesemuanya itu tidak terlepas dari kehidupan materi, sehingga banyak dari pada anak-anak sekarang mengambil jalan pintas untuk mendapat persetujuan dari orang tua mereka.<sup>20</sup>

Menurut Hammudah Abd Al-Ati, definisi keluarga dilihat secara operasional, yaitu “Suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga yang mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Menurut definisi di atas, keluarga diikat oleh dua hubungan yaitu hubungan darah dan hubungan pernikahan”. Bentuk-bentuk dari keluarga yang paling sederhana

---

<sup>20</sup> Abdul Manap, Warga Masyarakat Kelurahan Kecamatan Bukit Kapur, wawancara, Desember 2008

adalah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat tinggal.<sup>21</sup>

Selain itu, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pernikahan (perkawinan) anak-anaknya. Karena orang tua atau wali yang berkewajiban menikahkan anak perempuannya dan berhak menentukan apakah pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* (di bawah tangan) atau tidak.<sup>22</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Keluarga adalah pokok pertama yang mempengaruhi pendidikan seseorang. Lembaga keluarga adalah lembaga yang kuat berdiri diseluruh penjuru dunia sejak zaman dahulu. Ia merupakan tempat manusia mula-mula digembleng untuk mengarungi hidupnya.

Manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau “*homo educandum*”, yaitu makhluk yang harus dididik. Dan menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung, menyatakan bahwa pendidikan dilihat dari dua segi, yaitu pertama dari segi pandangan masyarakat dan kedua dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat itu tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi.

---

<sup>21</sup> Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. ke-3, h. 1

<sup>22</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 99

Dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Seperti potensi akal, potensi berbahasa, potensi agama dan sebagainya. Potensi-potensi tersebut harus diusahakan dan dikembangkan dengan sebaik mungkin agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam kitab suci al-Qur'an manusia disebut sebagai "*ahsanu taqwim*" yang berarti sebaik-baik bentuk, dan diantara makhluk Allah memang manusialah yang paling baik kejadiannya. Terutama yang paling penting bagi manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain adalah bahwa manusia mempunyai akal. Dengan akal yang ada padanya ini, manusia berusaha dapat membedakan antara yang baik dan buruk, terutama dalam hal pernikahan (perkawinan).<sup>23</sup> Yang mana tujuan tersebut menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).<sup>24</sup>

## 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya hubungan antara seseorang dengan orang lain atau antara

---

<sup>23</sup> Ramayulis, dkk, *op.cit.*, h. 7

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2, h. 3

suatu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Faktor ini dapat digolongkan kepada lingkungan fisik dan sosial budaya.<sup>25</sup>

Selain keluarga dan pendidikan, lingkungan di luar keluarga seperti masyarakat di sekitarnya juga dapat mendukung terjadinya nikah *sirri* (di bawah tangan) karena banyak nikah *sirri* (di bawah tangan) yang dilakukan salah satunya karena keleluasaan yang diberikan oleh pihak keluarga dan masyarakat, yang menganggap nikah *sirri* (di bawah tangan) sebagai suatu kegiatan biasa yang secara agama memang sah untuk dilakukan.

Akan tetapi perlu diketahui, bahwasanya salah satu tujuan dari perkawinan adalah memelihara keturunan/anak/nasab. Anak-anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya yang sebenarnya. Ditinjau dari segi psikologis maupun sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi serta status dirinya. Andaikan jalan perkawinan yang ditempuh tidak sah, tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan. Kalau sudah demikian, nilai-nilai moralitas yang mulia tercoreng dan tersebarlah benih-benih kehancuran serta peluang-peluang kejahatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), Cet. ke-1, Edisi-3, h. 4

<sup>26</sup> Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan (Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. ke-1, h. 13

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam, telah ditetapkan beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami-istri. Prinsip tersebut meliputi kebebasan memilih pasangan, *sakinah mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang), saling melengkapi dan melindungi, serta prinsip *mu'asyarah bil al ma'ruf* (memperlakukan pasangannya dengan perbuatan baik).<sup>27</sup>

Akan tetapi, pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, atau istilah sekarang ialah nikah *sirri* (di bawah tangan) mempunyai dampak terhadap pelakunya. Sehingga, nikah *sirri* (di bawah tangan) dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti *otentik* tentang pernikahannya.<sup>28</sup> Penyebab terjadinya nikah *sirri* yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku, karena masyarakat melihat bahwa nikah *sirri* secara agama adalah sah meskipun secara Undang-undang tidak dibenarkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>27</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 19

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 136



**TABEL III**  
**DASAR PELAKSANAAN PERNIKAHAN SECARA SIRRI**  
**MENURUT RESPONDEN**

No	Alternatif	Jumlah	Persentase
1	Undang-undang	2	13.3 %
2	Agama	12	80.0 %
3	Undang-undang dan Agama	1	6.7 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jawaban responden yang menyatakan dasar dari nikah *sirri* yang dilakukan adalah Undang-undang, yaitu sebanyak 2 responden atau 13.3 %, yang menyatakan bahwa nikah *sirri* yang dilakukan berdasarkan agama adalah 12 responden atau 80.0 %, dan yang menyatakan bahwa nikah *sirri* yang dilakukan berdasarkan Undang-undang dan Agama adalah 1 responden atau 6.7 %. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa yang menjadi dasar daripada masyarakat yang melakukan nikah *sirri* berdasarkan dari tuntunan ajaran agama.

Dengan demikian, banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dari nikah *sirri* (di bawah tangan) tersebut adalah bahwa perempuanlah yang banyak menjadi korban dari nikah *ssirri* itu sendiri, dan dampak adanya nikah *sirri* (di bawah tangan) belum banyak yang terungkap.

### **C. Tinjauan Hukum Islam.**

Bahwasanya salah satu dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap motivasi seseorang untuk melakukan nikah

secara *sirri* di Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilihat uraian berikut ini :

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah *sirri* artinya nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau ke Kantor Catatan Sipil. Biasanya nikah *sirri* dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun untuk menjaga agar tidak terjadinya kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.

Sah tidaknya nikah *sirri* secara agama, tergantung kepada sejauh mana syarat-syarat sah nikah itu terpenuhi, yaitu adanya wali, adanya saksi (minimal dua orang saksi), adanya mahar dan ijab qabul. Di samping itu, syarat bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan itu bukanlah pihak-pihak yang dilarang menikah menurut hukum Islam. Tujuan umum menetapkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hendak dituju oleh syari'at Islam ialah kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, akal, keturunan dan untuk melindungi harta benda.<sup>29</sup>

Hal ini dapat dilihat bahwasanya menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan peningkatan dari upaya menjaga kelestarian dan kemurniaan agama, kelestarian hidup generasi manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> M. Sudjari Dahlan, *op.cit.*, h. 39

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL IV**  
**JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM**  
**PERKAWINAN ISLAM**

<b>No</b>	<b>Alternatif</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Menjaga kelestarian dan kemurnian agama	3	20.0 %
2	Menjaga kelestarian hidup generasi manusia	5	33.3 %
3	Menjaga kelestarian dan kemurnian keturunan	5	33.3 %
4	Setiap orang bisa melakukan semuanya itu	2	13.4 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian responden menyatakan bahwasanya menegakkan hukum perkawinan Islam demi menjaga kelestarian dan kemurnian agama, ini terlihat dengan jumlah 3 orang atau 20.0 %, yang menyatakan bahwasanya menegakkan hukum perkawinan Islam demi menjaga kelestarian hidup generasi manusia adalah sebanyak 5 orang atau 33.3 %, dan yang menyatakan bahwasanya menegakkan hukum perkawinan Islam demi menjaga kelestarian dan kemurnian keturunan, berjumlah 5 atau 33.3 %, dan setiap orang bisa melakukan semuanya itu, berjumlah sebanyak 2 orang atau 13.4 %.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Selain daripada itu ada yang menyatakan bahwa pernikahan (perkawinan) itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang di kemudian hari.<sup>30</sup> Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT :

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.  
(الرعد : ٣٨)

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.  
(QS. Ar-Ra'd: 38)<sup>31</sup>

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, agar hidup berpasangan sebagai suami-istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh tak mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab qabul dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.<sup>32</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>30</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), Cet. ke-2, h. 9

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 376

<sup>32</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, *op.cit.*, h. 31

(PPN) atau Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap memenuhi syarat.<sup>33</sup>

Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pendaftaran / pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-.
- b. Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-. (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pernyataan PP tersebut di atas menunjukkan tidak tercatatnya perkawinan bukanlah berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah, namun hanya dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya dengan denda yang relatif ringan. Denda yang ringan tersebut relatif tidak sesuai dengan akibat yang mungkin akan timbul dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Ringannya sanksi yang ditentukan oleh negara melalui

---

<sup>33</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. ke-4, Ed. 1, h. 25

PP tersebut, jelaslah membuka peluang akan terus berlangsungnya pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan, seperti halnya nikah.<sup>34</sup>

Pernikahan di negara kita telah diatur dengan UU Perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika memperhatikan definisi atau pengertian di atas, maka nikah *sirri* pada dasarnya tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, meskipun saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat.<sup>35</sup> Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>34</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 42

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 41

**TABEL V**  
**PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG UNDANG-UNDANG**  
**PERKAWINAN**

No	Alternatif	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui undang-undang perkawinan	2	13.3 %
2	Tidak mengetahui undang-undang perkawinan	12	80.0 %
3	Ragu-ragu dengan undang-undang perkawinan	1	6.7 %
<b>Jumlah</b>		<b>15 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jawaban responden yang menyatakan bahwa mengetahui undang-undang perkawinan, yaitu sebanyak 2 responden atau 13.3 %, yang menyatakan bahwa tidak mengetahui undang-undang perkawinan adalah 12 responden atau 80.0 %, dan yang menyatakan ragu-ragu dengan undang-undang perkawinan adalah 1 responden atau 6.7 %.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden tentang Undang-undang perkawinan masih rendah. Dengan demikian sewajarnya masih banyak masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yang melaksanakan nikah secara *sirri*.

Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, nikah *sirri* (di bawah tangan) bukanlah masalah baru. Dan telah mencatat, bahwa istilah nikah *sirri* (di bawah tangan) itu berasal dari ucapan Umar Ibnu al-Khattab ra, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi

pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan.

Sehingga dalam realitanya, di dalam masyarakat Islam sering terjadi nikah *sirri* (di bawah tangan). Dan oleh masyarakat, nikah *sirri* itu dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum sah menurut undang-undang negara.<sup>36</sup>

Berdasarkan hukum nikah, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan karena mempunyai tujuan mulia. Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan, serta membina keluarga yang damai dan sejahtera.

Filosof Islam (Imam Ghazali) membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu, *pertama*, memperoleh keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, *kedua*, memenuhi naluri tuntutan hidup kemanusiaan, *ketiga*, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, membentuk rumah tangga yang menjadi dasar utama dari masyarakat besar, dan *kelima*, menumbuhkan kesungguhan untuk mencari rezki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sementara itu, pernikahan (perkawinan) menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu perjanjian yang kuat. Akad atau perjanjian ini dikatakan sah, apabila

---

<sup>36</sup> M. Sudjari Dahlan, *op.cit.*, h. 9-10



dilaksanakan sesuai dengan syarat akad nikah dan rukun nikah yang lengkap dengan syaratnya sesuai dengan ketentuan agama.<sup>37</sup>

Menurut agama, boleh melangsungkan akad pernikahan secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi mencatatkannya pada catatan resmi hukum positif di hadapan petugas yang berwenang, dengan cara yang sedapat mungkin jauh dari unsur pemalsuan dan kebohongan, sangat diperlukan untuk menjaga hak-hak yang bersangkutan jika terjadi pengingkaran dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Akad pernikahan (perkawinan) adalah akad agama yang mendapat tempat dan kemuliaan, oleh sebab itu syariat menjaganya dengan syarat-syarat dan aturan-aturan yang lebih banyak daripada akad yang lain, karena menjadikan istri terhadap wanita merupakan suatu perkara yang besar dalam pandangan Islam. Dan dengan akad tersusunlah masalah hubungan, keturunan, nafkah, waris dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>39</sup>

Dalam kebiasaan ada pemberitaan pernikahan (perkawinan) ketika melaksanakan akad karena sedang membicarakan nikmat Allah dan memberitakan kepada manusia, bahwasanya dalam hal pernikahan (perkawinan) terdapat hubungan syariat yang menjelaskan kehidupan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan pemberitaan dalam satu kumpulan dan ada hubungannya dengan akad

---

<sup>37</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 16

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 2 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2008), Cet. ke-4, h. 181

<sup>39</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, *loc.cit.*

pernikahan (perkawinan) yang telah disifati oleh al-Qur'an, bahwasanya pernikahan (perkawinan) adalah “perjanjian yang kokoh”. Dalam hal pernikahan (perkawinan) tidak ada prasangka jelek manusia, apabila pernikahan (perkawinan) diketahui oleh banyak orang yaitu dengan pernikahan (perkawinan) yang disyariatkan oleh agama dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>40</sup>

Akan tetapi, indikator di atas menunjukkan bahwa pernikahan (perkawinan) yang berbentuk *sirri* (di bawah tangan) mengandung sesuatu yang sengaja disembunyikan berkecenderungan dengan arti menyimpan masalah-masalah. Masalah dapat berupa kemungkinan ada pada diri orang yang melakukan pernikahan (perkawinan) atau adanya ketentuan hukum yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pernikahan (perkawinan) yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pernikahan (perkawinan) rahasia atau dirahasiakan karena menyimpan masalah.<sup>41</sup> Mungkin ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui hukum dasar dari pelaksanaan nikah *sirri* (di bawah tangan) menurut Islam. Dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan bahwa penyimpangan adalah sesuatu yang jarang terjadi, sesuatu yang jarang terjadi dianggap tidak ada.

العبرة للغالب والنادر لا حكم له.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 126

<sup>41</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 38

Artinya : “Patokan hukum adalah sesuatu yang sering terjadi, sesuatu yang jarang terjadi tidak dapat dijadikan patokan hukum.”<sup>42</sup>

Dan ditegaskan dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang kedua, yaitu :

درو الفاسد و جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan dan menarik kemaslahatan.”<sup>43</sup>

Dengan demikian, pernikahan (perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup> Demikian perumusan pernikahan (perkawinan) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan pernikahan (perkawinan) menurut agama biasanya dilakukan oleh pemuka agama, sedangkan pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi warga yang beragama selain agama Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 6

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 104

<sup>44</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, *op.cit.*, h. 43

<sup>45</sup> Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 3

Sehingga dalam prakteknya, naluri ingin berjodoh-jodohan di kalangan manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Maka Allah menurunkan hukum pernikahan (perkawinan) secara berangsur tapi pasti, namun tidak semua umat manusia yang mau menggunakan hukum Allah tersebut. Beruntung kita yang hidup di Indonesia, di mana hukum-hukum Allah dalam hal perkawinan (*munakahat*) telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang hukum pernikahan (perkawinan) dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Pernikahan (perkawinan) yang dilakukan di luar pengawasannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) merupakan hal yang penting dalam suatu pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kekuatan hukum. Dari pencatatan yang dilakukan ini mempelai laki-laki dan perempuan memperoleh Akta Nikah.

Sebagai bukti yang dapat dipercaya dari suatu pernikahan (perkawinan) adalah akta nikah. Akta nikah merupakan bukti telah melangsungkannya suatu pernikahan (perkawinan) yang diwujudkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan Undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Meskipun keberadaan akta nikah demikian penting, tetapi tidak semua keluarga memiliki akta nikah, karena mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

---

<sup>46</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h. 12

Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi pernikahan (perkawinan) tanpa akta nikah karena akad nikah hanya dilakukan oleh kiai atau *modin* “pejabat desa yang menangani masalah agama”, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan (perkawinan) mereka hanya sah secara hukum agama. Pernikahan (perkawinan) hanya mengikuti peraturan dan syarat agama tanpa dilakukan pencatatan tersebut pada umumnya dikenal dengan istilah nikah *sirri* (di bawah tangan).<sup>47</sup>

dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya selama pernikahan yang dilakukan secara *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu pada dasarnya sah, hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah atau tuduhan buruk dari masyarakat. Di samping itu nika *sirri* juga membawa kemudharatan secara sosial karena tidak terdaftar secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mempunyai Akta Perkawinan, maka status perkawinan tersebut melemahkan posisi kaum wanita jika pada suatu waktu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Apalagi jika nikah *sirri* itu hanya dijadikan kedok untuk perselingkuhan sehingga melabrak rukun dan syarat perkawinan yang baku, maka sudah barang tentu jatuh kepada perbuatan yang haram dalam perkawinannya itu.

---

<sup>47</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h. 12

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian yang terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan nikah *sirri* pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai, sudah sesuai dengan prosedur keagamaan, baik menyangkut syarat dan rukunnya, akan tetapi dalam pelaksanaan nikah *sirri* tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Faktor penyebab nikah *sirri* pada masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai adalah karena masyarakat memandang bahwa nikah *sirri* tersebut sesuatu yang sah menurut agama tanpa memandang ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku, kesemuannya itu tidak terlepas dari berbagai faktor dalam kehidupan masyarakat.
3. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *sirri*, selama pernikahan *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu pada dasarnya sudah sah, hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak menjadi fitnah atau tuduhan buruk dari masyarakat. Selain daripada itu nikah *sirri* juga membawa

kemudharatan secara sosial karena tidak terdaftar secara administratif pada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mempunyai Akta Perkawinan.

#### **A. Saran**

Setelah melihat nikah *sirri* atau di bawah tangan yang dilakukan oleh umat Islam, dan salah satunya adalah masyarakat Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Adapun alasan sebagian masyarakat melakukan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan adalah untuk mewujudkan kesucian dan penjagaan diri dari penyelewengan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, serta untuk menghalalkan hubungan mereka sebagai suami istri. Sehingga penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kita semua, karena itu menjadi kewajiban umat Islam terutama para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebelum sampai pada jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Baik melalui hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di negara kita.
2. Diharapkan bagi masyarakat yang ada Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur lebih memperhatikan pengetahuan agama terhadap pernikahan/ perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak tidak mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga.

3. Diharapkan kepada seluruh pihak instansi-instansi yang terkait, seperti tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan terutama para pihak PPN/KUA yang masih berada dalam ruang lingkup tugasnya sebagai seorang Qadhi/Wali Hakim/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam memberikan keteranga-keterangan yang jelas kepada masyarakat, terutama pada masyarakat muslim yang ada Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur tentang hukum perkawinan, perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di negara kita, dan lain sebagainya.
4. Diharapkan bagi pihak pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pengurusan Administratif dalam perkawinan maupun dalam hal-hal lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan (Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. ke-1

Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 2 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2008), Cet. ke-4

Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. ke-2

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar ?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), Cet. ke-1

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, Ed. 1

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), Cet. ke-2

Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), Cet. ke-1

Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007)

Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. ke-1

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. ke-4, Ed. 1

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, Ed. 2

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-1

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-3

M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), Cet. ke-1

M. Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), Cet. ke-1, Ed. 3

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), Cet. ke-2

Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. ke-3

Suwardi MS, *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*, (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-Riau, 1991), Cet. ke-1

UU Hamidy, *Orang Melayu di Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, 1996), Cet. ke-1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Medan: Duta Karya, 1995), Cet. ke-1



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I</b>	: Kondisi Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Berdasarkan Jenis Kelamin .....	15
<b>TABEL II</b>	: Kondisi Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Berdasarkan Tingkat Umur .....	16
<b>TABEL III</b>	: Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Menurut Suku .....	18
<b>TABEL IV</b>	: Kondisi Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	20
<b>TABEL V</b>	: Klasifikasi Pemeluk Agama Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur .....	22
<b>TABEL VI</b>	: Klasifikasi Rumah Ibadah Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur .....	24
<b>TABEL VII</b>	: Klasifikasi Lembaga Pendidikan Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur .....	25
<b>TABEL VIII</b>	: Klasifikasi Pendidikan Penduduk Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur .....	26
<b>TABEL I</b>	: Pengetahuan Responden Terhadap Bentuk-Bentuk Nikah Sirri .....	36
<b>TABEL II</b>	: Pengetahuan Responden Terhadap Bentuk-Bentuk Pencatatan Suatu Peristiwa Hukum .....	38
<b>TABEL I</b>	: Jawaban Responden Terhadap Akta Nikah .....	42

<b>TABEL II</b>	: Tingkat Pendidikan Responden yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Sirri .....	50
<b>TABEL III</b>	: Dasar Pelaksanaan Pernikahan Secara Sirri Menurut Responden .....	60
<b>TABEL IV</b>	: Jawaban Responden Terhadap Penegakkan Hukum Perkawinan Islam .....	62
<b>TABEL V</b>	: Pengetahuan Responden Tentang Undang-Undang Perkawinan .....	66

## **Angket (Questioner)**

### **A. Petunjuk Pengisian Angket**

1. Angket ini bertujuan memperoleh data sehubungan dengan penulisan Skripsi ini.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan dengan keikhlasan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian dan tidak mempengaruhi terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i.
3. Berilah jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i tersebut dengan memberikan tanda silang pada salah satu huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang telah disediakan.
4. Jawaban pertanyaan dalam angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Atas kejujuran dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi angket ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

### **B. Identitas Responden**

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Nama Suami/Istri : .....

Tempat/Tgl/Thn Menikah : .....

### **C. Pertanyaan**

1. Apakah pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu/Sdr/i lalui ?
  - a. SD
  - b. SLTP

- c. SLTA
  - d. Perguruan Tinggi
2. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i bentuk-bentuk dari nikah *sirri* itu apa saja ?
- a. Perkawinan/pernikahan Liar.
  - b. Perkawinan/pernikahan Sembunyi-semunyi.
  - c. Perkawinan/pernikahan Sipil.
  - d. Perkawinan/pernikahan Gantung.
3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui terhadap bentuk-bentuk pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang ?
- a. tan Perkawinan.
  - b. Pencatatan Kelahiran.
  - c. PencataPencatatan Kematian.
  - d. Semuanya benar.
4. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i nikah *sirri* yang dilakukan oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz, mempunyai kekuatan hukum seperti ?
- a. Mempunyai Akta Nikah.
  - b. Tidak mempunyai Akta Nikah.
  - c. Tidak memikirkan Akta Nikah.
5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui dasar dari pelaksanaan nikah *sirri* ?
- a. Berdasarkan Undang-undang.
  - b. Berdasarkan Agama.
  - c. Berdasarkan Undang-undang dan Agama.
6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui terhadap suatu Undang-undang dalam perkawinan ?
- a. Mengetahui undang-undang perkawinan.
  - b. Tidak mengetahui undang-undang perkawinan.
  - c. Ragu-ragu dengan undang-undang perkawinan.

7. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap pelaksanaan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan ?
- Pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan.
  - Pernikahan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Merupakan pernikahan yang biasa-biasa saja.
8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui sebab-sebab seseorang melakukan nikah *sirri* ?
- Takut diketahui oleh orang lain.
  - Menyembunyikan terhadap orang lain dengan alasan-alasan tertentu.
  - Tidak ada kesanggupan materi.
  - Tergantung pada diri pribadi seseorang.
9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i nikah *sirri* yang dilakukan oleh seseorang, sebabkan oleh faktor ?
- Faktor Ekonomi atau materi.
  - Faktor Birokrasi
  - Faktor Pendidikan.
  - Faktor Lingkungan.
10. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i penegakkan hukum perkawinan Islam merupakan peningkatan dari upaya ?
- Menjaga kelestarian dan kemurnian agama.
  - Menjaga kelestarian hidup generasi manusia.
  - Menjaga kelestarian dan kemurnian keturunan.
  - Setiap orang bisa melakukan semuanya itu.



## ANGKET

### D. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data sehubungan dengan penulisan Skripsi.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan dengan keikhlasan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian dan tidak mempengaruhi terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i.
3. Berilah jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i tersebut dengan memberikan tanda silang pada salah satu huruf a, b, c, d dan e pada jawaban yang telah disediakan.

### E. Pertanyaan

11. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap pelaksanaan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan ?
  - d. Pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan.
  - e. Pernikahan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Merupakan pernikahan yang biasa-biasa saja.
12. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i bentuk-bentuk dari nikah *sirri* apa saja ?

- a. Perkawinan/pernikahan Liar.
- b. Perkawinan/pernikahan Sembunyi-sembunyi.
- c. Perkawinan/pernikahan Sipil.
- d. Perkawinan/pernikahan Gantung.

13. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui terhadap bentuk-bentuk pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang ?

- d. Pencatatan Kelahiran.
- e. Pencatatan Perkawinan.
- f. Pencatatan Kematian.
- g. Semuanya benar.

14. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i nikah *sirri* yang dilakukan oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz, mempunyai kekuatan hukum seperti ?

- d. Mempunyai Akta Nikah.
- e. Tidak mempunyai Akta Nikah.
- f. Tidak memikirkan Akta Nikah.

15. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i nikah *sirri* yang dilakukan sering membawa dampak ?

- d. Kepada Istri.
- e. Kepada Anak-anak.
- f. Kepada Istri dan Anak-anak.
- g. Kepada Istri, Suami dan Anak-anak.

16. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui sebab-sebab seseorang melakukan nikah *sirri* ?

- e. Takut diketahui oleh orang lain.
- f. Menyembunyikan terhadap orang lain dengan alasan-alasan tertentu.
- g. Tidak ada kesanggupan materi.
- h. Tergantung pada diri pribadi seseorang.

17. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i nikah *sirri* yang dilakukan oleh seseorang, disebabkan oleh faktor ?

- e. Faktor Keluarga.
- f. Faktor Ekonomi atau materi.
- g. Faktor Pendidikan.
- h. Faktor Lingkungan.

18. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Sdr/i penegakkan hukum perkawinan Islam merupakan peningkatan dari upaya ?

- e. Menjaga kelestarian dan kemurnian agama.
- f. Menjaga kelestarian hidup generasi manusia.
- g. Menjaga kelestarian dan kemurnian keturunan.
- h. Setiap orang bisa melakukan semuanya itu.

## **BIOGRAFI PENULIS**

JUNADI, lahir di Dumai, Riau, 15 Juli 1979, putra pertama dari pasangan **M. Nazar** dan **Sri Asih**. Pendidikan formalnya dimulai di SD Yayasan Fi Sabilillah, Dumai (1987-1993), Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pesantren Al-Huda Dumai dan Madrasah Aliyah (MA) pada almamater yang sama, Dumai (1993-1999).

Berdasarkan tekad dan keinginannya sendiri, ia melanjutkan jenjang Strata 1 (S1) UIN SUSKA RIAU (2002-2010) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhsyah (Peradilan Agama dan Hukum Keluarga). Pada tanggal 20 Maret 2008 menikah dengan kekasih dan pujaan hati **Yeni Roza Noviana, A.Md** dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama **Muhammad Habib Al-Dini**.

Penulis mengabdikan dimasyarakat, beraktifitas di organisasi dakwah (Majelis Dakwah Islamiyah) Kota Pekanbaru. Pada Bulan Agustus 2008 penulis melaksanakan penelitian dengan judul Skripsi "NIKAH SIRRI DAN MOTIVASI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN BUKIT NENAS KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTAMADYA DUMAI)

Pada tanggal 14 Januari 2010, akhirnya penulis meraih gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) setelah melalui tahap Ujian Munaqasyah Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhsyah (Peradilan Agama dan Hukum Keluarga), yang dinyatakan LULUS di UIN SUSKA RIAU.

**MOTTO : *Why He Can I Can't, I Have To Can***

JUNADI, SH.I